

# **PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PENCEGAHAN BNNP RIAU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**Putri Merysa Hanna**

Email : Putrimerysahanna@yahoo.com

**Dibimbing oleh Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

## **Abstract**

The National Narcotics Department (BNN) is a Non Government Agencies Ministry (LPNK) Indonesia, which duties are prevention, eradication of abuse and illicit traffic in psychotropic, precursors, and other addictive substances except for the addictive ingredients of tobacco and alcohol. Provincial National Narcotics Division (BNNP Riau) carries out the duties, functions, and BNN authorities within the province. Based on the phenomenon and the fact, this research is conducted on the implementation of duties and functions of BNNP Prevention Division In Narcotics Abuse Prevention .

The purpose of this research is to determine the implementation of duties and functions of BNNP Prevention Division In Narcotics Abuse Prevention, and to identify the factors that affect the implementation of duties and functions of BNNP Prevention Division In Narcotics Abuse Prevention. The theory that is used as a analysis tool in this research is the theory of Ig. Wursanto (2005) on the organization elements, while the method is qualitative descriptive research that is intended to provide a systematic overview of the observed phenomenon.

Based on the results of research in the field of implementation of duties and functions of BNNP Prevention Division In Narcotics Abuse Prevention, BNNP Riau has completed it organizationally, where in completing the duties, BNNP Riau is quite able to do the functions properly. It can be seen from the Man (human) indicators, eventhough BNNP Riau has less personnel but on the environmental indicators, the implementation of duties keep running. The obstacle factors in carrying out the duties and functions of BNNP Riau prevention in preventing narcotics abuse is the lack of personnel, the lack of cooperation with external parties, and the lack of existing equipment in BNNP Riau, these conditions will result the performance of BNNP Riau implementation of duties and functions are not maximally carried out.

**Keywords :** *Implementation of Duties and Functions, Narcotics*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ilmu administrasi yang menganalisis mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan BNNP Riau dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan BNNP Riau dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

Penelitian ini bersifat metode deskriptif kualitatif yang memaparkan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini tidak menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penulis melakukan analisis terhadap data dan informasi yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar yang dikumpulkan secara menyeluruh. Analisis kualitatif ini dicari hubungan antara fenomena-fenomena yang ada berdasarkan data informasi yang telah dikumpulkan serta pedoman kepada landasan teori yang menjadi gambaran secara lengkap mengenai objek penelitian dan fenomena-fenomena yang melingkupinya sehingga diperoleh penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan serta membantu mencari pemecahan yang baik dan tepat.

Jenis dan Sumber data penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber informasi atau informan penelitian melalui wawancara dan observasi mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bidang pencegahan BNNP Riau dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Serta data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh

untuk melengkapi data primer. Data ini berupa keterangan dari bahan-bahan kepustakaan dan beberapa buku-buku referensi, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, Data tersebut diperoleh dari dokumen BNNP Riau dan data lain yang mendukung penelitian. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Konsep Teori dibutuhkan peneliti untuk menjadi dasar dalam penelitian dan berguna untuk membahas penelitian dan dapat menemukan kesimpulan serta saran. Untuk membahas pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pencegahan maka salah satu variabel yang bisa menjelaskannya adalah mengenai teori organisasi dan teori tugas-pokok dan fungsi.

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau

melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (2007:9),

“The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job” (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (2007:10), mengemukakan bahwa “A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose” (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (2007:10), menyatakan bahwa

“Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat (2007:11), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang

memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, Winardi (2003:24) Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sedangkan dalam Ilmu Administrasi Negara, fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi memiliki arti pekerjaan atau pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam manajemen dan ditentukan berdasarkan status yang ada padanya.

Robbins (2001:5) menyatakan organisasi merupakan kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasi secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Organisasi itu ada untuk mencapai tujuan-tujuan, kemudian seseorang (pemimpin) harus menetapkan tujuan-tujuan tersebut dengan alat atau cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Thoha (2007:117) pemahaman organisasi dari sebuah kelompok menekankan adanya

peningkatan efisiensi lewat pengerangkaan (struktur) dan pengendalian (controlling) dari partisipasi manusia. Orang-orang yang berada pada kelompok ini diduga bahwa mereka dapat termotivasi dengan cara memberikan intensif ekonomi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi itu luas dan jumlahnya cukup banyak. Dalam arti luas, lingkungan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan intern dan lingkungan ekstern. Lingkungan Intern adalah keseluruhan faktor yang ada dalam organisasi yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Wursanto (2005 ; 309-310) Faktor-faktor Intern yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi antara lain :

- a. Perubahan Kebijakan Pimpinan
- b. Perubahan Tujuan
- c. Pemekaran atau perluasan wilayah operasi organisasi
- d. Volume kegiatan yang bertambah banyak
- e. Tingkat pengetahuan dan keterampilan para anggota organisasi
- f. Sikap dan Perilaku dari para anggota organisasi
- g. Berbagai macam ketentuan atau peraturan baru yang berlaku dalam organisasi.

Lingkungan Ekstern adalah keseluruhan faktor yang ada diluar organisasi (faktor-faktor ekstern) yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan ekstern cukup banyak, diantaranya adalah Politik, Hukum, Kebudayaan, Teknologi, Sumber Alam, dan Demografi dan Sosiologi.

Wursanto 2005:53 dalam bukunya yang berjudul 'Dasar-dasar Ilmu Organisasi' menyatakan 6 unsur-unsur dari organisasi sebagai berikut :

- a. Man (orang-orang), dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering kali disebut dengan pegawai atau personnel. Pegawai atau personnel terdiri dari semua anggota atau anggota organisasi sendiri, yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari unsur pimpinan (administrator) sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi.
- b. Kerjasama, Yang dimaksud dengan kerjasama adalah suatu perbuatan yang saling bantu-membantu atau suatu perbuatan dimana yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan.
- c. Tujuan bersama, Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai sesuai dengan prosedur, program, pola (network), kebijaksanaan (policy), strategi, anggaran (budgeting), dan peraturan-peraturan (regulation) yang telah ditetapkan.
- d. Peralatan, Unsur yang keempat dari pada organisasi adalah peralatan atau equipment yang terdiri dari semua sarana/tool, berupa materi, mesin, uang, dan barang modal lainnya

- (tanah, gedung/bangunan/kantor)
- e. Lingkungan, Yang termasuk sebagai faktor lingkungan ini misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologis. Termasuk dalam unsur lingkungan, antara lain :
1. Kondisi atau situasi yang secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh terhadap gaya gerak dan kehidupan organisasi.
  2. Tempat atau lokasi, sangat mempengaruhi demi berkembangnya suatu organisasi.
  3. Wilayah operasi yang dijadikan sasaran kegiatan organisasi.

## PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Bidang Pencegahan BNNP Riau dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Ig. Wursanto (2005) yang mengatakan bahwa terdapat enam indikator unsur-unsur organisasi yaitu : Man (manusia), Kerjasama, Tujuan bersama, Peralatan, Lingkungan.

Untuk membahas masing-masing indikator penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan didalam variabel ini menyangkut tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pencegahan BNNP Riau dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

### 1. MAN

Man atau manusia merupakan salah satu dari unsur organisasi,

manusia selalu berperan aktif dan dominan didalam setiap kegiatan organisasi. Manusia merupakan faktor terpenting dalam tercapainya tujuan organisasi. Manusia dalam suatu organisasi disebut dengan personil, sumber daya manusia atau personil adalah setiap orang menjalankan suatu pekerjaan (job), fungsi, kewajiban (duty), tugas (task), jabatan (job, position) di dalam tangga dan atau kerangka organisasi yang mempunyai fungsi atau kedudukan dalam organisasi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi.

Jumlah personil yang cukup dan seimbang dengan kebutuhan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan BNNP Riau. Jika sebuah organisasi tidak menyeimbangkan setiap sumber daya yang dimiliki, maka organisasi tersebut akan kesulitan dalam menjalankan tugas-tugasnya maupun program-program kerjanya.

Dari hasil observasi peneliti dilapangan, BNNP Riau mempunyai kendala dalam kurangnya jumlah Personil, penulis melakukan wawancara dengan Kepala BNNP Riau dan Kepala Bidang Pencegahan untuk melihat indikator Man atau personil dengan mengajukan pertanyaan yaitu Bagaimana menurut Bapak dengan jumlah Personil yang sangat terbatas di kantor BNNP Riau ini? Jawaban informan adalah sebagai berikut :

“ BNNP Riau ini baru berdiri beberapa tahun yang lalu, masalah SDM ataupun jumlah personil pada BNNP Riau ini terbilang memang masih sangat sedikit dari yang

diharapkan, maka dari itu penambahan personil baik itu di bidang pencegahan, penyelidikan, maupun pemberdayaan masyarakat masih dalam proses penambahan personil, untuk jumlah personil di kantor ini keseluruhan masih 34 orang, sedangkan yang dibutuhkan adalah 196 orang. (wawancara dengan Kepala BNNP Riau, 30 Juni 2014).

“Kendalanya sampai saat ini selain kurangnya jumlah personil, dari pihak menpan faktanya yang kita dapatkan, kita butuh personil dibidang administrasi, tetapi yang kita dapatkan personil dibidang hukum, maka dari itu terjadi ketimpangan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan” (wawancara dengan Kepala BNNP Riau, 30 Juni 2014).

Dari tanggapan Kepala BNNP Riau terlihat bahwa jumlah personil yang ada pada BNNP Riau ini masih sangat kurang dari yang dibutuhkan, jumlah personil pada BNNP Riau hanya 34 Personil, padahal yang dibutuhkan adalah 196 Personil.

Dari data dan hasil wawancara dengan Key informan yang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pada masing-masing bidang belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kurangnya jumlah personil dan dikarenakan adanya ketimpangan antara jabatan yang diduduki dengan pendidikan terakhir para personil yang ada pada BNNP Riau yang tidak sesuai dengan bidang yang dibutuhkan, maka dari itu personil yang ada pada BNNP Riau harus menyesuaikan lagi dengan bidang

yang sekarang didudukinya. Tentu saja dalam hal keterbatasan personil ini harus segera di penuhi agar pelaksanaan tugas dan fungsi BNNP Riau pada masing-masing bidang bisa berjalan dengan maksimal dan dapat mengurangi jumlah penyalahgunaan Narkotika.

## 2. KERJASAMA

Kerjasama, Yang dimaksud dengan kerjasama adalah suatu perbuatan yang saling bantu-membantu atau suatu perbuatan dimana yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap organisasi mempunyai hubungan kerjasama dengan pihak internal maupun pihak eksternal, adanya hubungan kerjasama dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam suatu organisasi. Jika kerjasama sudah terjalin maka tujuan suatu organisasi akan tercapai. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara dibawah ini, antara lain sebagai berikut :

“Tentu, setiap bidang pada Bnnp Riau ini menjalin hubungan kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan saling berhubungan. Kalau dari pihak internal bentuk kerja sama kita dengan bidang yang lain contohnya begini, setelah kita melaksanakan tugas dibidang pencegahan tugas kita itu kita serahkan kepada bidang pemberdayaan masyarakat, kita yang membentuk kader, tetapi yang memberdayakan kader itu adalah tugas dari bidang pemberdayaan masyarakat, ketika kita mengetahui ada orang yang terlibat dengan narkoba, kita bekerja sama dengan bidang pemaberbantasan untuk menindaklanjuti kasus tersebut, karena seperti yang kita ketahui yang



berhak menindaklanjuti kasus narkoba itu adalah bidang berantas”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan, 01 Oktober 2014)

”Kita juga melakukan kerjasama dengan pihak eksternal, selama ini kita bekerjasama dengan pihak BKKBN, Hukum & Ham, dinas sosial, kesbangpol, dinas kesehatan, dan dari pihak swasta ada LSM Mercusuar dan LSM Siklus. Pihak BKKBN biasanya membantu kita menjadi narasumber dalam memberikan penyuluhan. Apa lagi dilingkungan BNNP ini sendiri belum mempunyai tenaga medis, dan tenaga penyuluh dibidang Hukum dan Ham dari Direktorat Narkoba, kita kan perlu bersinergi supaya pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya sekedar wacana tetapi ada tindakan lanjut”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan, 01 Oktober 2014)

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pencegahan dapat dilihat bahwa bidang pencegahan melakukan hubungan kerjasama dengan bidang pemberdayaan masyarakat maupun bidang pemberantasan, kerjasama dilakukan tidak hanya dengan pihak internal tetapi juga dari pihak eksternal baik itu pemerintah maupun swasta, kemudian penulis melakukan wawancara lagi dengan Kepala BNNP Riau dengan mengajukan pertanyaan apakah BNNP melakukan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mengurangi angka penyalahgunaan Narkoba?

”Kerjasama dengan pihak lain, tentu sebenarnya BNNP harus melakukan kerjasama dengan pihak lain agar penyalahgunaan narkoba bisa berkurang, seperti dalam inpres no 12 tahun 2011 yang mempunyai tugas untuk memberantas Narkoba

itu bukan hanya BNN saja tetapi pihak pemerintahan, swasta, maupun masyarakat juga ikut serta dalam mensukseskan indonesia bebas dari Narkoba. Tetapi sampai saat ini merka tidak dan mungkin belum menganggarkan kegiatan pencegahan Narkoba, sifatnya seperti kita yang menjemput bola ketempat mereka, belum ada kegiatan yang berbarengan dan menjadi tidak sinkron, kadang-kadang mereka yang mengundang pihak BNN untuk memberikan penyuluhan, maunya kita melakukan kegiatan kerjasama supaya dapat dibentuk intruksi gubernur dari implementasi inpres no 12 tahun 2011 tersebut”. (wawancara dengan Kepala BNNP Riau, 30 Juni 2014)

Kepala BNNP Riau menyatakan bahwa pihak eksternal baik itu pihak pemerintah maupun swasta belum mau melakukan kerjasama dengan pihak BNNP Riau, masyarakat juga belum mau ikut serta berpartisipasi dalam membantu BNNP Riau untuk bersama-sama memberantas Narkoba dari Provinsi Riau ini, untuk menanggapi pernyataan Kepala BNNP Riau, penulis mengadakan check ricek dengan melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat dan mengajukan pertanyaan apakah masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam memberantas Narkoba ini? Apakah menyelesaikan masalah Narkoba ini hanya tugas dari BNN saja? Berikut jawaban dari masyarakat :

”Ya sudah pasti dek, kalau kami diikut sertakan untuk membantu BNNP Riau, kami pasti akan ikut dek apalagi kita tahu ya sekarang ini kasus-kasus narkoba itu

juga menyebar kesemua kalangan, kami juga tidak mau anak-anak kami terkena kasus narkoba itu”. (Wawancara dengan Masyarakat, 03 Oktober 2014)

“Kasus narkoba ini sudah terlalu besar, gak akan ada lagi cara untuk memberantas narkoba ini, apa lagi seperti yang adek liat kasus-kasus di TV, mavia-mavianya itu sudah banyak, sekarang tergantung pribadinya aja lagi kalau mau rusak ya pakek aja tu narkoba, tapi kalau gak mau ya jangan pakai narkoba”. (Wawancara dengan Masyarakat, 03 Oktober 2014)

“BNNP itu kan sudah ditugaskan ya untuk memberantas narkoba, mereka juga pasti sudah ahli dan sudah taulah bagaimana untuk menangani masalah-masalah narkoba di Indonesia ini, ya biar mereka sajalah yang bekerja”. (Wawancara dengan Masyarakat, 03 Oktober 2014)

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat dapat dilihat bahwa memang belum semua masyarakat yang mau ikut serta dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau, dan berdasarkan hasil wawancara dengan key informen, sudah ada hubungan kerjasama dari pihak internal yang dilakukan pada masing-masing bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan sampai saat ini masih berjalan dengan baik demi mencegah meningkatnya penyalahgunaan narkoba, tetapi untuk kerjasama dengan pihak eksternal masih belum berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari berbedanya tanggapan antara Kepala BNNP Riau dengan

Kabid Pencegahan, dapat ditarik kesimpulan bahwa belum semua pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat yang mau ikut serta dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkoba.

### 3. TUJUAN BERSAMA

Tujuan bersama, Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai sesuai dengan prosedur, program, pola (network), kebijaksanaan (policy), strategi, anggaran (budgeting), dan peraturan-peraturan (regulation) yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa kutipan dibawah ini mengenai tujuan bersama BNNP Riau antara lain sebagai berikut :

“ Tujuan dari BNN itu sendiri kan untuk mensukseskan Visi dan Misi kita yaitu Indonesia Bebas dari Narkoba , jadi untuk BNNP Riau ini ya sudah pastinya untuk membebaskan Riau dari Narkoba tahun 2015, tetapi arti kata Indonesia Bebas Narkoba itu bukan berarti Narkoba harus segera bersih tahun 2015 ini, setidaknya bisa berkurang dan tidak meningkat, sampai saat ini kita terus berusaha berupaya mencapai tujuan kita bersama” (Wawancara dengan Kepala BNNP Riau, 30 Juni 2014)

“Untuk mencapai tujuan itu yang pastinya pertama kita memberdayakan dulu SDM yang ada di kantor kita ini, kita beri pelatihan dan sebagainya, tetapi seperti yang



saya katakan personil di kantor ini sangat kurang, jadi kurang membantu dalam mensukseskan tujuan kita, selain masalah personil seharusnya kita berkoordinasi dengan pihak-pihak eksternal seperti dari pihak pemerintahan ataupun dari pihak swasta, bersinergi dengan mereka khususnya dalam mencapai tujuan ini, tetapi sampai sekarang belum semua pihak pemerintah maupun swasta yang mau ikut serta bekerja sama dengan kita” (Wawancara dengan Kepala BNNP Riau, 30 Juni 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini BNNP Riau belum bisa mencapai tujuannya untuk membebaskan Provinsi Riau dari penyalahgunaan Narkoba, BNNP Riau khususnya bidang pencegahan terus berusaha melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba, dan menurut data yang ada pada BAB I, sampai saat ini angka penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Riau terus meningkat. Untuk itu pihak BNNP Riau seharusnya lebih berusaha lagi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan agar Provinsi Riau bisa bebas dari Narkoba.

#### 4. PERALATAN

Peralatan, Unsur yang keempat dari pada organisasi adalah peralatan atau equipment yang terdiri dari semua sarana/tool, berupa materi, mesin, uang, dan barang modal lainnya (tanah, gedung/bangunan/kantor). Peralatan adalah Sarana dan prasarana perlengkapan kerja yang dibutuhkan organisasi dalam mendukung pelaksanaan dan penyelesaian tugas-

tugas dari BNNP Riau. Peralatan yang dimaksud berhubungan dengan sarana, materi, mesin, uang dan barang modal lainnya seperti tanah, gedung/bangunan/kantor. Adapun beberapa kutipan dibawah ini mengenai peralatan antara lain sebagai berikut :

“.... tetapi sampai saat ini kurangnya peralatan bukan menjadi hal yang membuat ketidak nyamanan serta tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas mereka, karena dengan sarana dan peralatan yang ada dikantor ini juga sudah cukup membantu kami dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi walaupun belum semaksimal mungkin. Kami juga tau kalau BNNP Riau ini termasuk organisasi baru dan masih mempunyai peralatan yang minim” (wawancara dengan Kepala BNNP Riau, 30 Juni 2014)

Untuk menanggapi pernyataan di atas maka penulis mengajukan pertanyaan lagi dengan staff bidang pencegahan, apakah peralatan yang ada dikantor ini sudah cukup membantu dalam melaksanakan tugas? Baik itu peralatan dalam bentuk gedung, materi, ataupun inventaris kantor. Berikut hasil wawancara penulis dengan staff bidang pencegahan :

“Peralatan dikantor ini sangat kurang ya, dan masih banyak yang kurang juga, seperti kendaraan seringkali kendaraan menjadi kendala kita dalam melaksanakan tugas, karena kendaraan yang ada dikantor ini hanya 2 mobil saja, sepeti gedung, gedung kantor ini masih gedung sementara yang dipinjamkan pihak pemerintah, bisa dilihat masih banyak ruangan-ruangan yang dibutuhkan tetapi tidak

ada dikantor ini dikarenakan ruangan yang terbatas”. (wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan , 01 Oktober 2014)

Dari hasil wawancara dan data di atas terlihat jelas bahwa tanggapan Kepala BNNP Riau dengan staffnya berbeda, dimana dari Kepala BNNP sendiri menyatakan bahwa kurangnya peralatan bukan menjadi hal utama yang membuat ketidak nyamanan personil dalam pelaksanaan tugas , dan tidak menjadi kendala dalam menjalankan tugasnya. Namun tanggapan dari staff bidang pencegahan, kurangnya peralatan yang termasuk kedalam gedung, materi, ataupun inventaris kantor sangat mempengaruhi jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi.

## 5. LINGKUNGAN

Untuk mengetahui indikator lingkungan dapat dilihat dari penilaian sub indikator berikut ini :

### 1. Kondisi atau situasi

Kondisi atau situasi di sini maksudnya adalah sesuatu keadaan yang membuat pelaksanaan TUPOKSI BNNP Riau dapat berjalan secara maksimal ataupun sebaliknya membuat pelaksanaan tugas BNNP tidak berjalan dengan maksimal, seperti kondisi atau situasi dimana kurangnya dana dalam melaksanakan tugas-tugas dari BNNP Riau. Untuk melihat apakah kondisi atau situasi berhubungan dengan pelaksanaan TUPOKSI BNNP Riau pada bidang pencegahan, penulis melakukan wawancara

tentang indikator kondisi atau situasi kepada Kepala BNNP Riau, berikut hasil wawancara penulis :

“Tahun ini, BNNP Riau memiliki keterbatasan dana, dana kita dipotong untuk pemilu kemarin. Jadi untuk tahun ini kegiatan kita belum bisa maksimal, kondisi dan situasi seperti kurangnya dana memang menjadi kendala terhadap daya gerak kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di pencegahan ini, tetapi tahun 2015 kita akan lebih memperbanyak lagi kegiatan kita khususnya di advokasi maupun desiminasi informasi. (wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan , 01 Oktober 2014)

“ ya, sudah pasti situasi yang tidak memungkinkan dapat menghambat pelaksanaan tugas kami, contohnya saja saat kami dimintai untuk memberikan penyuluhan di pemerintahan ataupun dikampus-kampus, kami tidak bisa langsung menyetujui permintaan tersebut, karena setiap program kerja yang kami buat sudah disusun setiap tahunnya, kendalanya memang pada dana, dana yang sudah kami ajukan kepusat sudah diatur tiap tahunnya, jadi kami tidak bisa menyetujui permintaan tersebut secara langsung, harus menunggu tahun depan agar dapat dimasukkan dulu kedalam program kerja dan dapat diajukan keperintah

pusat” (wawancara dengan staff bidang pencegahan , 30 Juni 2014).

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa situasi dan kondisi kurangnya dana yang berasal dari APBN menjadi penghambat jalannya pelaksanaan tugas pada BNNP Riau, semua kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan program yang sudah ditetapkan setiap tahunnya, BNNP Riau tidak bisa menyetujui permintaan dari pihak manapun untuk melakukan kegiatan seperti memberikan penyuluhan ataupun membuat kegiatan FGD. Kondisi tersebut bukan menjadi kondisi utama dalam pelaksanaan TUPOKSI BNNP Riau.

Dari hasil pengamatan penulis melalui wawancara dengan Kepala BNNP Riau, ada situasi dan kondisi lain yang menghambat jalannya pelaksanaan TUPOKSI BNNP Riau, berikut wawancara penulis dengan Kepala BNNP Riau :

“ Begini dek, sebenarnya kondisi dan situasi utama yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas-tugas kami terletak pada kondisi yang disatu sisi kami masih membenahi masalah internal disatu sisi kami juga harus menyelesaikan masalah penyalahgunaan Narkoba ini, BNNP ini kan masih berjalan beberapa tahun yang lalu, jadi masalah internalnya saja masih harus kami benahi

seperti kurangnya personnel tadi, tidak lengkapnya peralatan kami dan yang lain, sedangkan masalah yang harus kami selesaikan diluar juga masih banyak, kondisi dan situasi yang seperti inilah yang membuat kami mungkin menjadi menghambat pelaksanaan tugas kami” (Wawancara dengan Kepala BNNP Riau, 30 Juni 2014)

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala BNNP Riau, penulis melihat kondisi dan situasi yang dialami pihak BNNP Riau memang menjadi penghambat jalannya pelaksanaan TUPOKSI, BNNP Riau ini baru berdiri menjadi organisasi vertikal pada tahun 2011, masih banyak masalah-masalah internal yang harus diperbaiki dulu, seperti personalia, peralatan dan sebagainya, sedangkan masalah eksternal juga harus segera diselesaikan.

## 2. Tempat atau lokasi

Tempat ataupun lokasi kegiatan yang dilaksanakan pihak BNNP Riau bidang pencegahan sangat erat hubungannya dengan penyelesaian masalah Narkoba,

Penulis melakukan wawancara dengan Staff Bidang Pencegahan dengan mengajukan pertanyaan yaitu, apakah tempat dan lokasi yang menjadi kegiatan bidang pencegahan ini sudah memasuki semua Provinsi Riau? Jawaban informan adalah sebagai berikut :

“ memang belum semua daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau ini kami masuki untuk diadakan kegiatan-kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba, semuanya butuh proses tetapi mudah-mudahan untuk tahun berikutnya kami memperbanyak wilayah operasi yang menjadi tempat lokasi kegiatan-kegiatan kami.” (wawancara dengan staff bidang pencegahan , 30 Juni 2014).

Lalu penulis melakukan wawancara dengan kepala bidang pencegahan dengan mengajukan pertanyaan yaitu, bagaimana seharusnya tempat dan lokasi yang harus dimasuki BNNP Riau ini khususnya bidang pencegahan? Jawaban informan sebagai berikut :

“Tempat dan lokasi untuk kegiatan BNNP Riau bidang pencegahan ini sudah pastinya di daerah Provinsi Riau saja, baik itu disekolah, universitas, pemerintahan ataupun swasta, karena kami BNNP Riau diberi batasan wilayah untuk Provinsi Riau saja, dan untuk Provinsi lainnya sudah ada BNNP yang lain” tetapi untuk daerah-daerah yang kami masuki memang belum semua kabupaten yang terjangkau oleh kami, ya seperti yang saya katakan tadi banyak kendala-kendala kami yang menjadi penghambat kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, seharusnya memang kegiatan-kegiatan kami ini

harus secepatnya dilaksanakan kesemua daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau ini, supaya semua masyarakat Riau ini tahu apa bahaya dari Narkoba dan mau bersama-sama memberantas Narkoba. (wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan , 01 Oktober 2014)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bidang Pencegahan sudah melaksanakan kegiatannya ke sekolah, universitas, pemerintahan maupun swasta yang ada di Pekanbaru, tetapi untuk di daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Riau ini masih banyak yang belum dimasuki oleh pihak BNNP Riau khususnya bidang pencegahan, seharusnya kegiatan-kegiatan bidang pencegahan ini dilaksanakan kesemua daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau agar semua masyarakat Riau mengerti dan tahu apa itu bahaya Narkoba.

### 3. Wilayah operasi

Wilayah operasi dibedakan menjadi wilayah kegiatan, wilayah personil, dan wilayah kewenangan. Wilayah kegiatan menyangkut jenis kegiatan atau macam kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh bidang pencegahan Berikut wawancara penulis mengenai sub indikator Wilayah kegiatan :

“Kita dibidang pencegahan ini melakukan kegiatan desiminasi informasi dan advokasi yang sudah di atur dalam TUPOKSI bidang pencegahan, tetapi tidak hanya melaksanakan kegiatan dibidang desiminasi informasi ataupun advokasi saja, kita juga membantu bidang pemberdayaan masyarakat apabila ada orang-orang yang ingin berkonsultasi dengan kita mengenai narkoba, karena kita tahu bahwa tugas dari pemberdayaan masyarakat ini cukup besar, dan personil nya juga kurang. Kita juga membantu bidang berantas untuk melakukan kegiatan tes urine, ” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan, 01 Oktober 2014)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masih ada daerah-daerah yang belum menjadi wilayah operasi kegiatan bidang pencegahan dikarenakan adanya kendala-kendala kurangnya dana yang menghambat jalannya kegiatan bidang pencegahan. Hal tersebut tentu saja menjadi salah satu faktor yang membuat masih banyaknya masyarakat-masyarakat yang ada di Provinsi Riau belum mengetahui bahaya dari Narkoba dan dapat meningkatkan angka penyalahgunaan Narkoba, hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan mantan pengguna Narkoba, berikut

wawancara penulis dengan mantan pengguna Narkoba :

“ kami makek narkoba itu karena rasanya enak dek, bisa bawak pikiran kami tu tenang, masalah-masalah tu rasanya hilang semua dari pikiran kami ni, waktu pertama kali kami menggunakan narkoba kami gak tau bahayanya itu apa, yang kami tau dari yang udah makek narkoba itu enak” (Wawancara dengan Pengguna Narkoba, 17 Oktober 2014)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mantan pengguna narkoba dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tahu dengan bahaya penyalahgunaan narkoba, mereka hanya menganggap bahwa narkoba itu bisa menenangkan pikiran, dan menghilangkan stres. Hal ini dikarenakan belum semua wilayah yang menjadi jangkauan kegiatan BNNP Riau, dan tentu dapat meningkatkan angka penyalahgunaan Narkoba, seharusnya pihak BNNP Riau harus bisa secepatnya menjangkau semua wilayah yang ada di Provinsi Riau ini agar semua masyarakat yang ada di Provinsi Riau tahu bahaya dari Penyalahgunaan Narkoba.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Bidang Pencegahan BNNP Riau dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika maka penulis membuat kesimpulan dan saran-saran agar bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk masa yang akan datang.

- a. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan BNNP Riau dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan data-data yang penulis dapatkan mengenai pelaksanaan Tugas dan Fungsi bidang pencegahan BNNP Riau dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan berjalan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.4 tahun 2010, dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pencegahan mampu menjalankan tugas-tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari indikator Man, Kerjasama, Tujuan Bersama, dan Lingkungan. Dimana dalam indikator Man (Personil), walaupun pihak BNNP Riau mengalami kendala dalam kurangnya Personil, tetapi pihak BNNP Riau tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan desiminasi informasi dan pelaksanaan advokasi dan agar tugas dan fungsi tetap berjalan personil merangkap tugas yang kosong, hal ini dapat dilihat dari indikator Lingkungan dalam sub indikator wilayah tugas, tetapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan adanya kendala yang terdapat pada kurangnya personil, tidak lengkapnya peralatan yang ada di BNNP Riau dan kurangnya

kerjasama dengan pihak eksternal baik itu pihak pemerintahan, swasta, maupun masyarakat.

- b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BNNP Riau Bidang Pencegahan dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP Riau pada Bidang Pencegahan dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika adalah Faktor Intern (Lingkungan Internal) dan Faktor Ekstern (Lingkungan Eksternal), dimana dalam Faktorn Intern terdapat indikator-indikator yaitu perubahan kebijaksanaan pimpinan, Pemekaran/perluasan wilayah operasi organisasi, Volume Kegiatan yang bertambah banyak, Tingkat Pengetahuan dan keterampilan dari para anggota organisasi dan faktor ekstern terdapat beberapa indikator yaitu hukum, kebudayaan dan teknologi. Dari kedua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pencegahan, faktor yang paling mempengaruhi adalah faktorn intern (Lingkungan Internal).

#### Saran

Dari penelitian yang telah penulis lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun maupun dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh pihak BNNP Provinsi Riau khususnya pada Bidang Pencegahan, yaitu sebagai berikut :



1. Mengingat Visi misi BNN adalah Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015 seharusnya sampai saat ini sudah terlihat pencapaian tujuan dari BNN
2. Pihak BNNP khususnya bidang pencegahan lebih meningkatkan mutu dan kualitas kegiatan-kegiatan baik dalam kegiatan advokasi maupun desiminasi informasi supaya tidak ada lagi orang yang menyalahgunakan narkoba.
3. Bidang Pencegahan secepatnya harus bisa menjangkau semua wilayah yang ada di Provinsi Riau supaya semua masyarakat Provinsi Riau bisa tahu bahaya Penyalahgunaan Narkotika.
4. Seharusnya pihak BNNP Riau lebih menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, baik itu dari pemerintah maupun swasta terutama kepada semua masyarakat supaya masalah narkoba bisa cepat diselesaikan.
5. Karena mengingat masih banyaknya angka penyalahgunaan narkoba Proses penambahan personil seharusnya harus cepat dilengkapi sesuai dengan yang jabatan-jabatan yang dibutuhkan agar terjadi keseimbangan dalam menangani kasus penyalagunaan narkoba di Provinsi Riau.
6. Seharusnya peralatan yang ada di BNNP Riau dapat dilengkapi sesuai dengan kebutuhan para personil, baik itu dalam bentuk sarana, mesin, materi, gedung/ kantor, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP Riau dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari BNNP Riau dapat tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Siswanto H.B. 2011. Pengantar Manajemen. Bandung: PT Bumi Aksara.
- Amirullah dan Budiyono, Haris. 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winardi, J. 2006. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutarto. 2002. Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Torang, Syamsir. 2013. Organisasi dan manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Gudono. 2012. Teori Organisasi. Yogyakarta: BPFE.
- Wursanto, Ignasius. 2005. Dasar-dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siagian, Sondang P. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.